

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, PERTUMBUHAN  
EKONOMI, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP  
PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL  
(Studi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Propinsi Jawa Tengah)**



**NASKAH PUBLIKASI**

Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

**OLEH:**

**Arief Ryan Aditya**

**B 200 090 150**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2014**

## HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertandatangan di bawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul:

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL (Studi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Propinsi Jawa Tengah 2009-2012)**

Yang ditulis oleh:

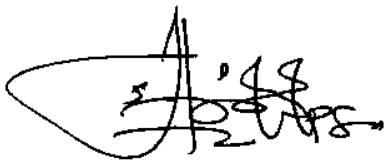
**ARIEF RYAN ADITYA**

**B 200 090 150**

Penandatangan berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, 27 Desember 2014

Pembimbing 2



**(Shinta Permata Sari, SE, M.Si)**

Pembimbing 1



**(Drs. Eko Sugiyanto, M.Si)**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta



  
Dr. Triyono, M.Si

## SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : **ARIEF RYAN ADITYA**

Nim : **B 200 090 150**

Fakultas/Program Studi : **Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi**

Jenis : **Naskah Publikasi**

Judul : **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Propinsi Jawa Tengah)**

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk

1. Memberikan hak bebas royalti kepada Perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk *softcopy* untuk kepentingan akademis kepada Perpustakaan UMS, tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Surakarta, 28 Desember 2014

Yang Menyatakan,



**(ARIEF RYAN ADITYA)**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, PERTUMBUHAN  
EKONOMI, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP  
PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL  
(Studi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Propinsi Jawa Tengah)**

**ARIEF RYAN ADITYA**

**B 200 090 150**

**ABSTRAKSI**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal study pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009-2012.

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Tengah sebanyak 29 Kabupaten dan 6 Kota. Sampel yang diperoleh dan dapat digunakan dalam penelitian ini berjumlah 35 Laporan Anggaran APBD Kabupaten dan Kota di Pemerintahan Jawa Tengah selama empat periode yakni 140 Anggaran. Anggaran yang diambil dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda, melalui uji  $R^2$ , uji F, uji asumsi klasik dan hipotesis diuji dengan uji t.

Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi diproksi dengan PDRB Harga Konstan tidak berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Modal.

Kata Kunci: *pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal*

## **A. PENDAHULUAN**

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini menyebabkan munculnya aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek tersebut menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk dalam bidang pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan seluruh aktivitas dan kerja finansial Pemerintah Daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2002). UU No. 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerahnya.

UU tersebut memberi penegasan setiap daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan, dan kemampuan daerah. Anggaran daerah adalah salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Anggaran ini dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan pemerintah daerah. Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah, karena terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, anggaran harus dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah (UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1). APBD di satu sisi menggambarkan pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek daerah dalam satu tahun anggaran dan di sisi lain menggambarkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran yang telah dianggarkan. Proses penyusunan anggaran melibatkan dua pihak yaitu eksekutif dan legislatif. Eksekutif (Pemerintah Daerah) berkewajiban membuat draft/rancangan APBD yang hanya bisa dilaksanakan apabila sudah disahkan oleh legislatif (DPRD). Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai

pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Dalam upaya pemerintah meningkatkan kemandirian daerah mereka dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki, dengan cara memberi proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor produktif di daerah dan melakukan usaha untuk mencari dan menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru atau belum ada. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik.

Pemberian otonomi daerah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena, memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004).

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU No 32 Tahun 2004). Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerah.

## **B. LANDASAN TEORI**

### **1. Otonomi Daerah**

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Inti dan pesan mendasar dari undang-undang tersebut adalah mendorong proses pemberdayaan (peningkatan ekonomi), menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, serta meningkatkan peran serta masyarakat.

## **2. Anggaran Penyelenggaraan Daerah**

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam satuan moneter, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.

## **3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 22, Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibagi menjadi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

## **4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber utama penerimaan bagi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

## **5. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

## **6. Dana Alokasi Umum**

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah yang

bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

## **7. Belanja Modal**

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah dalam PP RI No. 24 tahun 2005, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Penjelasan berikutnya menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal yang dimaksud dengan belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

## **C. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena empiris yang disertai data statistik, karakteristik dan pola hubungan antar variabel. Populasi dalam penelitian ini adalah 35 Pemerintah Kabupaten dan Kota Propinsi Jawa Tengah dari tahun 2009-2012. Sampel dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Tengah yang telah mempublikasikan Laporan Anggaran APBD. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh/sensus. Sampling jenuh/sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Seluruh pemerintah Kabupaten dan Kota Propinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota yang telah mempublikasikan Laporan Anggaran APBD ke situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan [www.djpk.go.id](http://www.djpk.go.id), serta data Pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh angka PDRB harga konstan dari BPS Jawa Tengah yang dipublikasikan dalam situs resmi [www.jateng.bps.go.id](http://www.jateng.bps.go.id). Jadi seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah dapat digunakan sebagai sampel. Penelitian ini akan menguji data



pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah selama 4 tahun anggaran, yaitu tahun anggaran 2009-2012. Jadi secara keseluruhan terdapat 140 anggaran (35x4) yang diuji.

#### **D. ALAT ANALISIS DATA**

##### **1. Uji Asumsi Klasik**

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, maka perlu dilakukan pengujian data untuk mendeteksi ada tidaknya penyimpangan terhadap asumsi klasik atas persamaan regresi yang digunakan. Uji asumsi klasik meliputi: normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas.

##### **2. Uji Hipotesis**

analisis regresi digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta memprediksi nilai variabel dependen dengan menggunakan variabel independen. Dalam analisis regresi variabel independen berfungsi untuk menerangkan (explanatory) sedang variabel dependen berfungsi sebagai yang diterangkan (the explained). Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi seberapa besar kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Persamaan regresi adalah:

$$BM = a + b_1PAD + b_2PE + b_3DAU + e$$

Keterangan:

BM = Belanja Modal

a = Konstanta

b = Slope atau Koefisien Regresi

PAD = Pendapatan Asli Daerah

PE = Pertumbuhan Ekonomi

DAU = Dana Alokasi Umum

e = eror

#### **E. HASIL PENELITIAN**

##### **1. Uji Regresi Berganda**

Berdasarkan Analisis regresi, persamaan model yang didapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$BM = -9726,469 + 0,454PAD + 0,000PE + 0,191DAU + e$$

Untuk uji F, diperoleh angka F hitung sebesar  $51,060 > 2,67$  dengan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$  hal ini berarti menunjukkan regresi yang fit. Pengujian selanjutnya nilai  $R^2$  dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi dengan *Adjusted-R<sup>2</sup>* 0,519 yang berarti variabel dependen dapat dijelaskan variabel independen sebesar 51,9%.

Uji hipotesis menggunakan uji t (*t-test*) untuk menguji kekuatan pengaruh variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen.

a. Uji Hipotesis Pertama (H1)

Hasil uji t untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran Belanja Modal (BM) menunjukkan angka t hitung sebesar 4,483 lebih besar daripada t tabel sebesar 1,977 atau nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  oleh karena itu  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  terdukung secara statistik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya antara lain Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) yang menyatakan bahwa PAD mempunyai pengaruh nyata terhadap belanja modal, kemudian Saptaningsih Sumarmi dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa PAD merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

b. Uji Hipotesis Kedua (H2)

Hasil uji t untuk variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) yang diproksi dengan PDRB Harga Konstan terhadap anggaran Belanja Modal (BM) menunjukkan angka t hitung sebesar -0,181 lebih kecil daripada t tabel sebesar 1,977 atau nilai signifikansi  $0,856 > 0,05$  oleh karena itu  $H_0$  diterima dan  $H_2$  tidak terdukung secara statistik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) tidak berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

Hasil temuan ini sesuai dengan penelitian Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) dan Dini dan Novita (2013) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi pengeluaran modal. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal.

c. Uji Hipotesis Ketiga (H3)

Hasil uji t untuk variabel Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap anggaran Belanja Modal (BM) menunjukkan angka t hitung sebesar 7,020 lebih besar daripada t tabel sebesar 1,977 atau nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  oleh karena itu  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  terdukung secara statistik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya antara lain Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) yang menyatakan bahwa DAU mempunyai efek terhadap pengeluaran modal, kemudian Askam Tuasikal (2008) yang menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap alokasi anggaran belanja modal.

## F. Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian, analisis data dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t yang mana menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  (4,483) lebih besar daripada  $t_{tabel}$  (1,977) dengan nilai signifikansi  $0,000 < \alpha = 0,05$  oleh karena itu  $H_1$  terdukung secara statistik.
2. Pertumbuhan Ekonomi yang diproksi PDRB Atas Dasar Harga Konstan tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t yang mana menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  (-0,181) lebih kecil daripada  $t_{tabel}$  (1,977) dengan nilai signifikansi  $0,856 > \alpha = 0,05$  oleh karena itu  $H_2$  tidak terdukung secara statistik.
3. Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t yang mana menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  (7,020) lebih besar daripada  $t_{tabel}$  (1,977) dengan nilai signifikansi  $0,000 < \alpha = 0,05$  oleh karena itu  $H_3$  terdukung secara statistik.

## G. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah sampel yang diperoleh pada penelitian ini terbatas hanya pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Tengah.

2. Periode dalam penelitian ini relatif pendek yaitu dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012.
3. Penelitian ini hanya terbatas pada variabel pendapatan asli daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi yang diproksi PDRB harga konstan, dan dana alokasi umum (DAU) yang mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal (BM).

## **H. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah dilakukan diatas, sehingga saran-saran yang dapat penulis berikan:

1. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan penelitian dengan populasi penelitian tidak hanya terbatas pada satu propinsi, tetapi dapat dilakukan di beberapa propinsi di Indonesia.
2. Penelitian selanjutnya disarankan mencoba melakukan penelitian dengan periode pengamatan yang lebih lama dalam melakukan penelitian.
3. Bagi penelitian selanjutnya disarankan menambah faktor-faktor lain atau variabel independen lain yang belum digunakan dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Nugroho. 2005. *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Dengan Metodologi Berorientasi Objek*. Bandung: Informatika
- Andirfa, Mulia. 2009. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal". *Skripsi Fakultas Ekonomi - Jurusan Akuntansi Universitas Syiah Kuala* Didownload dari: [www. http://jurnalak.blogspot.com/2009/12/pengaruh\\_pertumbuhan-ekonomi-pendapatan.html](http://jurnalak.blogspot.com/2009/12/pengaruh_pertumbuhan-ekonomi-pendapatan.html) )
- Arbie Gugus Wandira. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*. ISSN 2252-6765
- Askam Tuasikal. 2008. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*. Vol. 1, No. 2. Hal. 142-155
- Darwanto dan Yustikasari, Yulia. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Procceding SNA X Universitas Hasanudin Makasar*. ASPP 04.
- Dini Arwati dan Novita Hadiati. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Terapan (SEMANTIK)*. ISBN: 979-26-0266-6
- Effenin Sujoko, Stevanus Hadi Darmadji dan Yuliawati Tan. 2004. *Metode Penelitian Untuk Akuntansi Sebuah Pendekatan Praktis*. Jawa Timur: Bayumedia Publishing.
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2001. Analisis Deskriptif Pengaruh Fiscal Stress pada APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. *KOMPAK STIE YO*. Yogyakarta. Hal: 127-146

Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali. *Procceding SNA VI Surabaya. SESI 1/F*

Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI

Produk Domestik Regional Atas Dasar Harga Konstan Propinsi Jawa Tengah: [www.bps.com](http://www.bps.com)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB Tahun 2008 *Tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 Tentang Bagan Akun Standar*

Realisasi APBD Tahun 2009-2012 Propinsi Jawa Tengah Dalam: [www.djpk.go.id](http://www.djpk.go.id)

Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999. *Tentang Pemerintah Daerah*.

\_\_\_\_\_. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintah Daerah*.

\_\_\_\_\_. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

\_\_\_\_\_. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

[www.jateng.go.id](http://www.jateng.go.id)